

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Setelah melakukan penelitian langsung dengan menyebarkan angket yang diajukan kepada 95 responden yang terdiri dari masyarakat dan kepala desa beserta perangkat desa di satuan kerja Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Kemudian peneliti mengolah data hasil jawaban angket yang telah diisi oleh responden menggunakan aplikasi SPSS 20, maka tujuan yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah untuk menjelaskan:

#### **A. Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.**

Dari pengujian variabel  $X_1$  Penerapan *Good Governance* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeyn<sup>87</sup> dan Azlim dkk<sup>88</sup> yang menyatakan bahwa Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fadli, berdasarkan hasil

---

<sup>87</sup> Elvira Zeyn, “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan”, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, Volume 1. Nomor 1. Hal 21-37, Universitas Pasundan Bandung, 2011

<sup>88</sup> Azlim, Darwanis dan Usman Abu Bakar, “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”, Jurnal Akuntansi Volume 1. Nomor 1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2012.

penelitiannya membuktikan bahwa Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan artinya semakin baik tata kelola pemerintahan atau *Good Governance* maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik begitu sebaliknya. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pemerintah harus merubah sistem birokrasi yang akuntabel.<sup>90</sup> Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak di sertai dengan transparansi maka keuangan tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya di dapatkan. Kesimpulannya bahwa jika ingin mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau *Good Governance* maka pemerintah salah satunya harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hal keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebaga berikut:

- a. Relevan artinya informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dengan memprediksi masa depan serta

---

<sup>89</sup> Gusrya Indria Sari dan Fadli, “Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

<sup>90</sup> Rai Devia dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Good Governance* Pada Pemerintah Provinsi Bali”. ISSN: 2337-3067. Vol.7 No.4 2018, hal. 3

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yaitu memiliki umpan balik (*Feedback Value*) dimana informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi eskpektasi mereka dimasa lalu, memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, tepat waktu, artinya Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan dan lengkap artinya informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

- e. Andal artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik diantaranya penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.
- f. Dapat dibandingkan artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan pada umumnya.

g. Dapat dipahami artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.<sup>91</sup>

Penyajian laporan keuangan lembaga publik menurut PSAP 01 adalah menyusun laporan keuangan dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.<sup>92</sup> Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Tujuan umum laporan keuangan menurut PSAP 01 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. PSAP 01 menyatakan Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan

---

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

<sup>92</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “Penyajian Laporan Keuangan”, (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2019), hal. 33

dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun,<sup>93</sup>

## **B. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.**

Dari pengujian variabel  $X_2$  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwita dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan dan menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif artinya semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..<sup>94</sup> Hasil penelitian ini juga mendukung secara konsisten penelitian yang dilakukan oleh Juwita dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota/Kabupaten Jawa Barat.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 42-43

<sup>94</sup> Erma Purwita, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Kuningan)”. Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2013.

<sup>95</sup> Rukmi Juwita, “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Trikonomika*, Volume.12 Nomor. 2 Desember 2013

Bedasarkan hasil penelitian penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Simo sudah baik terbukti bahwa di Pemerintahan Desa Simo pengakuan pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual dalam hal pencatatan administrasi dan keuangan didasarkan pada nilai historis. Pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Di Pemerintahan Desa Simo informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitas saja. Pelaporan laporan keuangan dibuat per periode. Laporan keuangan Pemerintah Desa Simo menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintah dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor.

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian kementriannya maupun di pemerintah daerah dan dinas dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dipemerintahan

dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintah.<sup>96</sup> Dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dengan ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategi yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan.<sup>97</sup>

Adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara

---

<sup>96</sup> Mahmudi, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta: UII Pres. 2009), hal.15

<sup>97</sup> Irvan Permana, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas*, (Skripsi pada Universitas komputer Indonesia, Bandung. 2011. hal.2

jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah, dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan.<sup>98</sup>

### **C. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.**

Dari hasil pengujian variabel secara simultan didapat hasil bahwa  $H_0$  ditolak dan terima  $H_a$ . Karena F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikansi F yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  atau dengan kata lain penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.

Penerapan *Good Governance* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar

---

<sup>98</sup> Nugraheni, Purwaniati, dan Subaweh,I."Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan." Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 13(1) Tahun 2008.

Akuntansi Pemerintah 01 dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.

Penerapan *Good Governance* dan penerapan Standar Akuntansi pemerintah jika dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang sama akan sejalan dan saling mempengaruhi. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah harus merubah sistem birokrasi yang akuntabel,<sup>99</sup> untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi, jika akuntabilitas keuangan daerah tidak di sertai dengan transparansi maka keuangan tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya di dapatkan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan.<sup>100</sup> Dengan diterapkan Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

---

<sup>99</sup> Rai Devia dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali”. ISSN: 2337-3067. Vol.7 No.4 2018, hal. 3

<sup>100</sup> Nugraheni, Purwaniati, dan Subaweh,I.”Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 13(1) Tahun 2008.